YASIN
Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya

p-ISSN: 2808-2346
e-ISSN: 2808-1854

Terindeks: SINTA 5, Copernicus, Dimensions, Scilit, Lens, Crossref, Semantic, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/yasin.v5i2.5261

TAMBO ALAM PAUH DUO DAN SURAMBI SUNGAI PAGU SEBAGAI PANDUAN DALAM PENETAPAN NAGARI DI KABUPATEN SOLOK SELATAN, SUMATERA BARAT

Tambo Alam Pauh Duo and *Surambi Sungai Pagu* as Guidelines in the Establishment of *Nagari* in Solok Selatan Regency, West Sumatra

Agil Angriyansyah Putra
Universitas Indonesia
agilangriyansyah@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Feb 27, 2025	Mar 11, 2025	Mar 23, 2025	Mar 28, 2025

Abstract

Tambo plays a crucial role in the governance system of nagari in West Sumatra; however, modernization and government policies have influenced its sustainability. This study aims to analyze the role of Tambo Alam Pauh Duo and Surambi Sungai Pagu in the establishment of nagari in Solok Selatan Regency and the factors affecting their continuity. Using a qualitative approach with historical ethnographic methods, this research involves in-depth interviews with traditional leaders, community figures, and local government representatives, as well as an analysis of historical documents and relevant regulations. The findings reveal that tambo serves four primary functions: as a marker of cultural identity, a basis for territorial legitimacy, a governance guideline for nagari administration, and a tool for social harmonization. Community participation, customary documentation, government regulations, and globalization play significant roles in shaping the sustainability of the nagari governance system. The main challenges identified include the impact of modernization, which shifts the role of customary traditions in governance, and the

Yasin Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

weakening of customary documentation, threatening the continuity of traditional values. Therefore, a collaborative effort between indigenous communities and the government is essential to maintaining a balance between tradition and contemporary changes. The digitization of tambo and the strengthening of regulations that accommodate customary values are strategic steps to ensure the relevance and sustainability of nagari governance in the future.

Keywords: Tambo, Nagari, Cultural Identity, Indigenous Governance, Sustainability

Abstrak: Tambo memiliki peran krusial dalam sistem pemerintahan nagari di Sumatera Barat, namun modernisasi dan kebijakan pemerintah telah memengaruhi keberlanjutannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Tambo Alam Pauh Duo dan Surambi Sungai Pagu dalam penetapan nagari di Kabupaten Solok Selatan serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi etnografi sejarah, melibatkan wawancara mendalam dengan pemangku adat, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah, serta analisis dokumen sejarah dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tambo memiliki empat fungsi utama, yaitu sebagai identitas budaya, dasar legitimasi wilayah, pedoman tata kelola pemerintahan nagari, dan alat harmonisasi sosial. Partisipasi masyarakat, dokumentasi adat, regulasi pemerintah, serta globalisasi berperan dalam menentukan keberlanjutan sistem pemerintahan nagari. Tantangan utama yang dihadapi adalah modernisasi yang menggeser peran adat dalam tata kelola pemerintahan dan lemahnya dokumentasi adat yang mengancam kesinambungan nilai-nilai tradisional. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara masyarakat adat dan pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara tradisi dan perubahan zaman. Digitalisasi tambo dan penguatan regulasi yang mengakomodasi nilai-nilai adat menjadi langkah strategis untuk memastikan relevansi dan keberlanjutan pemerintahan nagari di masa depan.

Kata Kunci: Tambo, Nagari, Identitas Budaya, Pemerintahan Adat, Keberlanjutan

PENDAHULUAN

Perkembangan nagari di dalam suatu daerah memang mempunyai sejarah yang panjang, dengan benturan budaya-budaya yang mempengaruhi kehidupan di dalam masyarakat. Nagari di Sumatera Barat bisa diartikan sebagai "negeri" atau wilayah yang sudah mempunyai lembaga adatnya. Dalam penyebaran wilayah dan sejarah nagari, orang Minang dikenal dengan "Tambo". Sejarah Tambo merupakan uraian singkat tentang perkembangan nagari yang secara turun-temurun diturunkan oleh nenek moyang melalui lisan. Sehingga perkembangan nagari dari masa ke masa selalu memiliki nilai sejarah nenek moyang yang diceritakan melalui bertutur, atau ingatan kolektif yang dimiliki oleh masyarakatnya (Nasir, 2023).

Solok Selatan, sebagai salah satu kabupaten di Sumatera Barat, memiliki tradisi dan budaya yang kuat dalam menentukan sistem pemerintahan nagari. Dua aspek budaya yang memainkan peran penting dalam pembentukan dan pengelolaan nagari di wilayah ini adalah Tambo Alam Pauh Duo dan Surambi Sungai Pagu. Tambo menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan sebagai sejarah. Dalam konteks masyarakat Minang, tambo merujuk pada warisan budaya yang mencakup kisah-kisah legenda dan sejarah mengenai asal-usul suku bangsa, negeri, dan tradisi di Minangkabau (Irawan & Hanida, 2020). (Munir & Pandin, 2018) menyebutkan bahwa tambo Minangkabau merupakan sebuah istilah historiografi tradisional, yaitu penulisan sejarah suatu negeri berdasarkan anggapan atau kepercayaan masyarakat setempat secara turun-temurun. Sejarah tambo memberikan gambaran perkembangan dalam suatu nagari di Solok Selatan, terutama di Nagari Alam Pauh Duo Nan Batigo, yang secara boundaries mempunyai hubungan sejarah kerajaan dan perkembangan nagari-nagari yang berada di Solok Selatan, serta hubungan antara nagari-nagari tersebut (Nazmi, 2023).

Ketidakseimbangan antara aturan adat dan regulasi formal sering kali menimbulkan konflik kewenangan antara pemerintah daerah dan pemangku adat. Selain itu, lunturnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai dalam Tambo Alam Pauh Duo dan Surambi Sungai Pagu berpotensi menghilangkan identitas budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Ketidakjelasan ini berimplikasi terhadap keberlangsungan pemerintahan nagari yang berbasis adat serta mengancam kelestarian sistem sosial masyarakat Minangkabau yang berorientasi pada Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) (Firdaus, 2017).

Pembentukan nagari melalui kesepakatan adat sangat mempengaruhi waktu dan dialektika yang panjang, sehingga terjadinya kesepakatan dalam bentuk adat. Adat yang merupakan panduan masyarakat hidup dalam bernagari. Bernagari tidak berdiri dengan sendirinya di Kabupaten Solok Selatan, sebelum kemerdekaan Indonesia, nagari secara adat sudah ada dan sudah mempunyai aturan adatnya masing-masing (Firdaus, 2015). Untuk menjawab permasalahan ini, penelitian ini bertujuan untuk menggali kembali esensi Tambo Alam Pauh Duo dan Surambi Sungai Pagu dalam proses penetapan nagari di Kabupaten Solok Selatan. Kajian ini dilakukan dengan pendekatan historis dan antropologis guna memahami bagaimana nilai-nilai adat dalam tambo dan surambi dapat dijadikan sebagai pedoman dalam tata kelola pemerintahan nagari yang tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, solusi yang ditawarkan diharapkan dapat mengintegrasikan sistem adat dan regulasi

modern dalam membangun struktur pemerintahan nagari yang lebih harmonis dan berkelanjutan.

Secara teoritik, penelitian ini didasarkan pada konsep sejarah lokal dan sistem pemerintahan tradisional yang menjadi landasan dalam memahami dinamika masyarakat adat. Teori kontinuitas dan perubahan dalam sejarah akan digunakan untuk menganalisis bagaimana Tambo Alam Pauh Duo dan Surambi Sungai Pagu mengalami adaptasi terhadap perubahan sosial dan politik. Selain itu, teori sosiologi hukum adat menjadi kerangka analisis dalam melihat peran hukum adat dalam konteks regulasi modern, sehingga dapat mengidentifikasi potensi harmonisasi antara kedua sistem tersebut.

Penelitian mengenai peran tambo dalam membentuk identitas masyarakat Minangkabau dan pemerintahan nagari di Sumatera Barat telah mendapatkan banyak perhatian dari kalangan akademisi. Tambo tidak hanya berfungsi sebagai catatan sejarah dan budaya, tetapi juga memainkan peranan kunci dalam pembentukan identitas dan tradisi lokal. Dalam konteks ini, penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tambo berkontribusi signifikan terhadap pengakuan dan penguatan identitas budaya masyarakat Minangkabau. Penelitian mengenai seni pertunjukan Minangkabau menekankan bagaimana pertunjukan seperti Gandang Sarunai dapat diperlihatkan sebagai manifestasi dari tradisi budaya masyarakat Alam Surambi Sungai Pagu, yang sekaligus memperkuat identitas sosial mereka (Maestro & Marzam, 2018); (Marzam et al., 2023). Dalam hal pemerintahan nagari, struktur desentralisasi di Sumatera Barat juga membutuhkan perhatian.

Penelitian yang dilakukan oleh (Erniyusmanita et al., 2024) menggambarkan interaksi antara masyarakat dan pendamping desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, yang mengimplikasikan adanya hubungan antara adat, partisipasi sosial, dan praktik pemerintahan lokal. Penelitian tambahan tentang karakteristik dan potensi budaya di Kabupaten Solok Selatan, termasuk Kawasan Saribu Rumah Gadang, menunjukkan pemahaman yang dalam tentang bagaimana tata kelola dan nilai-nilai adat dapat berintegrasi dalam pengembangan masyarakat (Febrianto et al., 2022). Namun, masih terdapat celah penelitian yang signifikan, yaitu kurangnya studi yang secara spesifik mengkaji hubungan antara Tambo Alam Pauh Duo dan Surambi Sungai Pagu sebagai panduan utama dalam penetapan nagari di Solok Selatan.

Oleh karena itu, penelitian baru ini akan mengisi kekosongan pengetahuan mengenai bagaimana sejarah dan adat, yang termanifestasi dalam Tambo, dapat memberikan kerangka kerja yang kuat untuk pemahaman sistem pemerintahan lokal di Solok Selatan. Konteks

keberlanjutan sistem adat yang mendukung praktik pemerintahan nagari sejalan dengan temuan tentang perlunya integrasi nilai-nilai budaya dalam kebijakan lokal (Ramadhan et al., 2023). Fokus pada Tambo sebagai panduan dalam menetapkan nagari diharapkan membawa perspektif baru yang mengaitkan aspek historis dan kultural dengan struktur pemerintahan lokal, mendemonstrasikan adanya interaksi yang kompleks antara sejarah, adat, dan sistem administratif berbasis masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi dan menganalisis peran Tambo Alam Pauh Duo dan Surambi Sungai Pagu sebagai pedoman dalam penetapan nagari di Solok Selatan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi etnografi sejarah untuk menelusuri peran Tambo Alam Pauh Duo dan Surambi Sungai Pagu dalam penetapan nagari di Kabupaten Solok Selatan (Sugiyono, 2020). Metode ini dipilih untuk memahami konteks historis dan sosiokultural tambo dalam struktur pemerintahan nagari. Penelitian ini dilakukan selama enam bulan, dari Agustus 2024 hingga Januari 2025, di beberapa nagari di Kabupaten Solok Selatan yang memiliki sejarah kuat dalam penggunaan tambo sebagai pedoman adat. Subjek penelitian terdiri dari tokoh adat, pemuka masyarakat, sejarawan lokal, serta pemerintah nagari yang memiliki pengetahuan mengenai tambo dan adat Minangkabau. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap naskah-naskah tambo serta dokumen resmi pemerintahan nagari (Syafruddin, 2023). Analisis data dilakukan dengan pendekatan historis-kritis untuk menafsirkan makna tambo dalam struktur pemerintahan nagari, serta menggunakan triangulasi sumber untuk meningkatkan validitas hasil penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Solok Selatan selama enam bulan, dengan pengujian keabsahan data melalui metode member checking, diskusi dengan pakar, dan analisis kontekstual terhadap temuan lapangan.

HASIL

1. Sejarah

a. Solok Selatan dan Nagari

Solok Selatan adalah wilayah yang terletak di bagian selatan Provinsi Sumatera Barat, dekat dengan Gunung Kerinci. Kabupaten ini memiliki bentang alam yang kaya dengan vegetasi

alami yang membentang di sepanjang Bukit Barisan. Dengan luas wilayah 3.346,20 km², Solok Selatan dikelilingi oleh pemandangan hijau dan memiliki sejarah filosofis yang kuat dalam perkembangannya. Secara administratif, kabupaten ini berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi di sebelah selatan dan dikelilingi oleh tiga kabupaten di Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Dharmasraya. Pusat pemerintahan Kabupaten Solok Selatan terletak di Padang Aro, sekitar 161 km dari Kota Padang (Firdaus, 2015).

Perkembangan Solok Selatan dipengaruhi oleh sejarah kerajaan yang pernah berkuasa di daerah ini serta dinamika administrasi pemerintahan. Kabupaten ini awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Solok sebelum akhirnya resmi berdiri sendiri pada 7 Januari 2004 berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003. Proses pemekaran ini didorong oleh semangat otonomi daerah untuk meratakan pembangunan hingga ke tingkat daerah. Upaya pemekaran sudah dirintis sejak tahun 1950-an melalui konferensi masyarakat setempat yang mengusulkan pembentukan Kabupaten Sehiliran Batang Hari, meskipun pada saat itu belum berhasil. Pada masa Hindia Belanda, wilayah ini dikenal sebagai Afdeeling Solok (Undri, 2019).

Popularitas nama Solok Selatan semakin meningkat setelah dikeluarkannya Keputusan Mendagri Nomor 132/78 pada 11 Agustus 1978, yang mengukuhkan wilayah pembantu Bupati Solok Selatan dengan cakupan empat kecamatan (e-kompas.id). Secara kultural, Solok Selatan terdiri dari dua subkultur utama, yaitu Alam Surambi Sungai Pagu dan Rantau 12 Kota. Sebelum era kemerdekaan, keduanya memiliki struktur pemerintahan yang berbeda (Firdaus, 2015).

Satuan pemerintahan terkecil di Sumatera Barat adalah nagari, yang sudah ada sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. Dalam sistem ini, Kerapatan Adat Nagari (KAN) memiliki peran penting dalam pembinaan masyarakat adat. KAN dipimpin oleh Niniak Mamak dan berfungsi sebagai lembaga yang menjaga norma adat serta menjalankan aturan adat dalam kehidupan sosial masyarakat. Pembentukan nagari sangat erat kaitannya dengan sistem adat Minangkabau yang berbasis pada kesepakatan adat dan aturan adat yang mengikat seluruh warganya.

b. Asal Usul Penghuni Pauh Duo

Kerajaan Pauh Duo pertama kali berpusat di Banuaran, yang menjadi pusat pemerintahan dan perkembangan nagari di Pauh Duo, Solok Selatan. Pada masa Kerajaan Melayu Pura,

kerajaan ini memiliki hubungan erat dengan Kerajaan Singosari di Pulau Jawa. Berdasarkan cerita sejarah, ketika Kerajaan Singosari melakukan kunjungan ke Melayu Pura, mereka melewati Kerajaan Alam Pauh Duo dan pada akhirnya terjalin pernikahan politik antara keluarga kerajaan Melayu Pura dan Kerajaan Singosari. Raja Hayam Wuruk dikisahkan dijodohkan dengan Puti Bungsu, keponakan Raja Melayu Pura di Dharmasraya (Undri, 2019).

Nagari Pauh Duo memiliki dua kelarasan adat utama, yaitu Koto Piliang dan Bodi Chaniago. Koto Piliang dipegang oleh Datuak Katumanggungan dan dikenal dengan sistem pemerintahan hierarkis, sedangkan Bodi Chaniago, yang dipimpin oleh Datuak Parpatiah Nan Sabatang, lebih mengedepankan sistem musyawarah mufakat. Filosofi adat Minangkabau yang menyatu dengan ajaran Islam menciptakan keseimbangan antara tradisi lokal dan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat. Pemekaran wilayah di Minangkabau membawa perubahan pada struktur sosial nagari yang kini beradaptasi dengan sistem administrasi desa modern (Firdaus, 2015).

c. Sejarah Alam Pauh Duo Nan Batigo

Sejarah adalah refleksi dari perkembangan masa lalu yang digunakan sebagai pelajaran bagi masa kini dan masa depan. Penamaan Alam Pauh Duo Surambi Sungai Pagu memiliki keterkaitan dengan perkembangan nagari di Solok Selatan. Nama "Alam Pauh Duo" terdiri dari tiga kata: Alam, Pauh, dan Duo. "Alam" menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki aturan adat sendiri tanpa perlu meminta persetujuan dari wilayah adat lainnya (Undri, 2019). Kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu didirikan oleh Syamsudin Sutan Sadewa, yang dikenal sebagai Daulat yang Dipertuan Bagindo Sutan Besar Tuanku Rajo Disambah. Kerajaan ini memiliki subkultur Minangkabau yang kuat dan terbagi ke dalam beberapa wilayah, termasuk Surian, Rantau Nan 12 Koto Sangir, dan Pesisir Selatan (Firdaus, 2015). Secara adat, Alam Pauh Duo memiliki kepemimpinan yang berpegang pada filosofi "kusut bulu pauh nan manyalasaian," yang berarti bahwa setiap permasalahan diselesaikan oleh pemimpin adat. Kata "Duo" dalam nama wilayah ini merujuk pada dua pemimpin utama, yaitu Inyiak Samiek dan Inyiak Samilu Aie, serta seorang dubalang bernama Inyiak Sikok Sutan Majoleo (Undri, 2019).

1) Kedatangan Versi Pertama: Pauh dari Sriwijaya

   Menurut tambo adat, sebelum bernama Pauh Duo, wilayah ini disebut "Tanah Badanguik Tana Badantuang." Dikisahkan bahwa peradaban ini berkembang dengan pengaruh dari Sriwijaya. Para pendatang pertama berasal dari kerajaan Sriwijaya dan

menetap di daerah ini, membentuk komunitas yang berperan dalam penyebaran budaya dan adat istiadat Minangkabau.

2) Kedatangan Versi Kedua: Dari Dharmasraya

Dalam sejarahnya, Alam Pauh Duo Nan Batigo juga dikisahkan sebagai bagian dari ekspansi Kerajaan Melayu Pura yang berpusat di Dharmasraya. Penguasa Melayu Pura mengirim utusan ke Alam Pauh Duo untuk memperluas pengaruhnya, tetapi kedatangan mereka tidak diterima dengan baik oleh penduduk asli yang sudah lebih dahulu menetap di sana. Pertemuan ini menyebabkan konflik sebelum akhirnya terjadi proses asimilasi budaya. Dalam catatan sejarah, wilayah ini juga dikenal dengan sebutan "kuali nan tajarang," yang menggambarkan kondisi geografisnya yang dikelilingi bukit dan sungai yang jernih dengan latar belakang Gunung Kerinci. Kehidupan sosial masyarakat di Alam Pauh Duo dipengaruhi oleh interaksi antara berbagai kelompok pendatang yang membawa serta budaya dan tradisi mereka.

Sejarah ini menunjukkan bahwa perkembangan sosial dan budaya di Solok Selatan merupakan hasil dari interaksi panjang antara tradisi lokal, pengaruh kerajaan-kerajaan besar, serta dinamika pemerintahan modern yang terus berkembang hingga saat ini.

2. Hasil

a. Peran Tambo dalam Penetapan Nagari di Kabupaten Solok Selatan

Tambo merupakan bagian dari historiografi tradisional masyarakat Minangkabau yang berfungsi sebagai pedoman dalam penetapan nagari. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa tambo berperan dalam empat aspek utama, yaitu identitas budaya, legitimasi wilayah, pedoman tata kelola, dan harmonisasi sosial.

Tabel 1. Persepsi Masyarakat terhadap Peran Tambo dalam Pemerintahan Nagari

No	Aspek Peran Tambo	Persentase Responden yang Setuju (%)
1.	Legitimasi Wilayah	85%
2.	Identitas Budaya	90%
3.	Harmonisasi Sosial	75%
4.	Pedoman Tata Kelola	80%

Tabel diatas menunjukkan bahwa identitas budaya merupakan aspek yang paling diakui oleh masyarakat (90%). Hal ini menunjukkan bahwa tambo tidak hanya berfungsi sebagai warisan sejarah, tetapi juga sebagai penguat jati diri masyarakat Minangkabau. Sementara itu, legitimasi wilayah juga menjadi faktor yang penting (85%), di mana tambo memberikan dasar historis terkait batas-batas nagari yang diakui secara adat.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberlanjutan Pemerintahan Nagari

Keberlanjutan pemerintahan nagari di Solok Selatan tidak hanya bergantung pada nilai adat, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti regulasi pemerintah, partisipasi masyarakat, dokumentasi adat, dan pengaruh globalisasi.

Tabel 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberlanjutan Pemerintahan Nagari

No	Faktor	Pengaruh terhadap Keberlanjutan (%)
1.	Dokumentasi Adat	60%
2.	Pengaruh Globalisasi	75%
3.	Partisipasi Masyarakat	85%
4.	Regulasi Pemerintah	70%

Tabel diatas menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh paling besar terhadap keberlanjutan pemerintahan nagari (85%). Hal ini mengindikasikan bahwa peran aktif masyarakat dalam menjalankan dan mempertahankan adat merupakan faktor utama dalam menjaga eksistensi nagari. Sementara itu, pengaruh globalisasi (75%) menunjukkan bahwa modernisasi dan perubahan sosial memberikan tantangan tersendiri bagi sistem pemerintahan nagari. Regulasi pemerintah (70%) juga berperan dalam memastikan bahwa sistem pemerintahan adat dapat beradaptasi dengan kebijakan yang berlaku. Dokumentasi adat memiliki pengaruh yang lebih rendah (60%), tetapi tetap menjadi elemen penting dalam menjaga kesinambungan nilai-nilai adat.

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran tambo dalam penetapan nagari di Kabupaten Solok Selatan serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan pemerintahan nagari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tambo memainkan peran penting dalam empat aspek utama, yakni identitas budaya, legitimasi wilayah, pedoman tata kelola, dan harmonisasi sosial. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fauzi & Kumalasari, 2020), yang menegaskan bahwa historiografi tradisional dalam masyarakat Minangkabau berfungsi tidak hanya sebagai rekaman sejarah, tetapi juga sebagai alat legitimasi sosial dan politik. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa regulasi pemerintah, partisipasi masyarakat, dokumentasi adat, dan pengaruh globalisasi turut berkontribusi terhadap keberlanjutan sistem pemerintahan nagari, memperkuat temuan sebelumnya dari

(Tsosie, 2018) yang menyoroti pentingnya interaksi antara struktur adat dan kebijakan modern dalam keberlanjutan sistem tradisional.

Identitas budaya merupakan faktor yang paling diakui oleh masyarakat (90%), menunjukkan bahwa tambo tidak hanya menjadi dokumen sejarah, tetapi juga berfungsi sebagai penguat jati diri masyarakat Minangkabau. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nazmi, 2023), yang menegaskan bahwa tambo adalah manifestasi dari nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, legitimasi wilayah yang diakui oleh 85% responden menunjukkan bahwa tambo masih digunakan sebagai dasar historis dalam menentukan batas wilayah nagari, menguatkan kajian dari (Munir & Pandin, 2018), yang menemukan bahwa batas-batas adat dalam pemerintahan nagari sering kali lebih dipatuhi dibandingkan batas administratif yang ditetapkan pemerintah.

Dalam konteks keberlanjutan pemerintahan nagari, partisipasi masyarakat memiliki pengaruh paling besar (85%), mengindikasikan bahwa keterlibatan aktif masyarakat sangat diperlukan dalam menjalankan dan mempertahankan adat. Studi yang dilakukan oleh (Ramadhan et al., 2023) juga menunjukkan bahwa sistem pemerintahan tradisional yang melibatkan masyarakat secara langsung memiliki ketahanan lebih baik dibandingkan dengan sistem yang bergantung pada regulasi formal semata. Pengaruh globalisasi (75%) menunjukkan bahwa modernisasi membawa tantangan baru bagi sistem pemerintahan adat, selaras dengan temuan dari (Nazmi, 2023), yang mengidentifikasi bahwa globalisasi dapat menyebabkan erosi nilai-nilai adat jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang tepat.

Regulasi pemerintah (70%) juga berperan dalam memastikan bahwa sistem pemerintahan adat dapat beradaptasi dengan kebijakan yang berlaku, meskipun dalam beberapa kasus menimbulkan ketegangan antara adat dan regulasi negara. Dokumentasi adat, meskipun memiliki pengaruh lebih rendah (60%), tetap menjadi elemen penting dalam menjaga kesinambungan nilai-nilai adat. Hasil ini mendukung studi dari (Firdaus, 2015), yang menemukan bahwa dokumentasi yang baik dapat memperkuat legitimasi hukum adat dalam menghadapi tantangan modernitas dan perubahan sosial.

Hubungan antara tambo dan struktur pemerintahan nagari menegaskan bahwa tambo digunakan sebagai pedoman dalam menentukan batas wilayah nagari serta dalam penyusunan aturan adat yang mengatur kehidupan masyarakat. Namun, tantangan muncul dalam mempertahankan nilai-nilai tambo di tengah perubahan sosial yang cepat. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nasir, 2023), yang menunjukkan bahwa pergeseran

nilai dalam masyarakat akibat perubahan sosial dan ekonomi sering kali mengancam keberlanjutan norma-norma adat yang telah lama dijalankan.

Temuan penelitian ini memperkuat teori bahwa historiografi tradisional, seperti tambo, tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi sejarah, tetapi juga sebagai instrumen legitimasi sosial dan politik dalam masyarakat adat. Berbeda dengan kajian sebelumnya yang lebih berfokus pada aspek historis tambo (Irawan & Hanida, 2020), penelitian ini menambahkan dimensi baru dalam teori keberlanjutan pemerintahan adat dengan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan dokumentasi adat merupakan faktor utama dalam menjaga kesinambungan sistem pemerintahan nagari.

Selain itu, penelitian ini memberikan wawasan bahwa perlu adanya pendekatan yang mengombinasikan adat dan kebijakan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas dalam pemerintahan nagari. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menegaskan relevansi teori yang ada, tetapi juga menawarkan model adaptasi yang dapat diterapkan dalam konteks pemerintahan adat lainnya di Indonesia. Model ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi pelestarian adat yang lebih efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa tambo memiliki peran penting dalam penetapan nagari di Kabupaten Solok Selatan sebagai identitas budaya, legitimasi wilayah, pedoman tata kelola, dan alat harmonisasi sosial. Keberlanjutan pemerintahan nagari sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, dokumentasi adat, regulasi pemerintah, serta dampak globalisasi. Namun, modernisasi dan perubahan sosial menjadi tantangan dalam menjaga nilai-nilai adat yang diwariskan melalui tambo. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara adat dan kebijakan pemerintah agar tradisi tetap relevan dalam sistem pemerintahan modern. Sebagai langkah strategis, penguatan dokumentasi adat berbasis digital dapat menjadi solusi dalam melestarikan tambo agar tetap dapat diakses oleh generasi mendatang. Selain itu, kebijakan yang lebih inklusif dalam mengakomodasi peran adat dalam sistem pemerintahan lokal perlu dikembangkan untuk memastikan keberlanjutan nagari. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa tanpa upaya adaptasi dan perlindungan terhadap nilai-nilai adat, identitas budaya yang menjadi landasan masyarakat dapat mengalami degradasi. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi efektivitas integrasi adat dan

regulasi formal dalam berbagai konteks sosial di Indonesia, guna memperkuat peran warisan budaya dalam pembangunan masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

Erniyusmanita, Putra, M. A., & Tri Yanti. (2024). Pengaruh Pendamping Desa Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa (Studi Pada Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, *1*(1), 10–19. https://doi.org/https://doi.org/10.59837/jpnmb.v1i1.22

Fauzi, R., & Kumalasari, D. (2020). Education of National Characters Based on Local Cultural Values in History Learning Through Traditional Philosophy of Minangkabau. *In 2nd International Conference on Social Science and Character Educations (ICoSSCE 2019)*, *54*(4), 55–61. https://doi.org/10.2991/assehr.k.200130.012

Febrianto, H., Osronita, O., Yulita, F., & Ismayani, N. (2022). Analisis kawasan saribu rumah gadang sebagai (culture-heritage geopark) sumatera barat kabupaten solok selatan. *Jurnal Azimut*, *4*(1), 28–35. https://doi.org/10.31317/jaz.v4i1.796

Firdaus. (2015). History and Culture of the Kingdom of Alam Surambi Sungai Pagu, South Solok. *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, *1*(2). https://doi.org/https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/98745563641556258

Firdaus. (2017). Nilai-nilai Filosofis, Minangkabau, ABS-SBK. *Majalah Ilmu Pengetahuan Dan Pemikiran Keagamaan Tajdid*, *20*(2), 68–79. https://doi.org/https://doi.org/10.15548/tajdid.v20i2.76

Irawan, B., & Hanida, R. P. (2020). *Dari Luhak Ke Rantau; Kronik Pemekaran Dan Penggabungan Nagari*. Rancak Publik.

Maestro, E., & Marzam. (2018). The Concept and Meaning of Gandang Sarunai Music as Reflected Through The Social and Cultural Activities of The Alam Surambi Sungai Pagu Community of South Solok District, West Sumatra. *Sixth International Conference on Languages and Arts (ICLA 2017)*, *23*(1), 263-267). https://doi.org/10.2991/icla-17.2018.46

Marzam, WS, H., Indrayuda, & Esy Maestro. (2023). Continuity and Changes in Gandang Sarunai's Music Performance in Alam Surambi Sungai Pagu Society's Socio-Cultural Activities, South Solok Regency, West Sumatra. *Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora*, *22*(1), 135–144. https://doi.org/10.24036/humanus.v22i1.112775

Munir, M., & Pandin, M. G. R. (2018). The Local Genius Values of Minangkabau Society. *In International Conference of Communication Science Research (ICCSR 2018)*, 302–306. https://doi.org/10.2991/iccsr-18.2018.67

Nasir, M. (2023). Penulisan Sejarah Rekonsiliatif: Refleksi Pendampingan Penulisan Tambo Nagari Pakan Rabaa Timur. *Catimore: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *2*(2), 43–58. https://doi.org/10.56921/cpkm.v2i2.136

Nazmi, R. (2023). Sosialisasi Pentingnya Pewarisan Nilai Sejarah Lokal Minangkabau bagi Generasi Muda di Nagari Tuo Pariangan Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar

(Gelora Support System Pada Literasi, Budaya Dan Teknologi). Akademia Pustaka.

Ramadhan, R., Purwaningsih, E., Syarif, A., Triyatno, T., & Ruman, R. (2023). Pendampingan Masyarakat Desa Wisata Untuk Mempromosikan Kawasan Saribu Rumah Gadang di Nagari Koto Baru, Solok Selatan. *Abdi: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*. https://doi.org/10.24036/abdi.v5i3.452

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian , Kuntitatif, Kualitatif, Dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.

Syafruddin. (2023). Metode Pengumpulan Data Kualitatif. In N. Saputra (Ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif* (pp. 27 – 43). Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

Tsosie, R. (2018). Indigenous Peoples and "Cultural Sustainability": The Role of Law and Traditional Knowledge. *Traditional Ecological Knowledge: Learning from Indigenous Practices for Environmental Sustainability*, *12*(4). https://doi.org/10.1017/9781108552998.014

Undri, U. (2019). Kearifan Lokal Masyarakat Pedesaan di Simancuang Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, *1*(1), 317188. https://doi.org/10.36424/jpsb.v1i1.111